

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**EVALUASI UNIT USAHA SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK DESA
BALAI MAKAM BERSATU TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT
DI DESA BALAI MAKAM KECAMATAN BATHIN
SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



DIAN MUSTNAINI
NPM : 157310001

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Dian Mustnaini
NPM : 157310001
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dan diuji dalam sidang konfeherensif.

Pekanbaru, 12 April 2019

Pembimbing I



Dr. H. Rahyunir Rauf., M.Si

Pembimbing II



Yendri Nazir., S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Budi Muliando, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Dian Mustnaini
NPM : 157310001
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, *relative* telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfeherensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 12 April 2019

Ketua

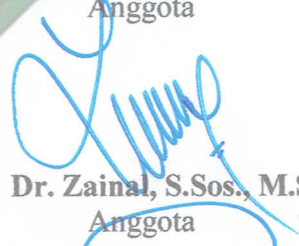

Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Sekretaris


Budi Mulianto, S.IP., M.Si
Anggota

Mengetahui
Wakil Dekan 1


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Dr. Zainal, S.Sos., M.Si
Anggota


Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

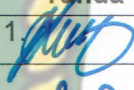

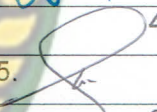
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 206 /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 11 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Jumat tanggal, 12 April 2019 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Dian Mustnaini
NPM : 157310001
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Dampak unit Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bangkalis.

Nilai Ujian : Angka : "82,62" ; Huruf : "A"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 12 April 2019
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 385 /UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Dian Mustnaini
N P M	: 157310001
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Dampak Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr.Khairul Rahman, Sos, M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Budi Muliando, S.IP, M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr.Zainal, S.Sos, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Yendri Nazir, S.Sos, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Septa Juliana, S.Sos, MA | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 April 2019
An. Dekan



Dr. H. Panca Setyo Prihatin., S.Ip., M.Si

Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
- 4.A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dian Mustnaini
NPM : 157310001
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 12 April 2019

An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si


Budi Muliando, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan 1


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.Sos., M.Si

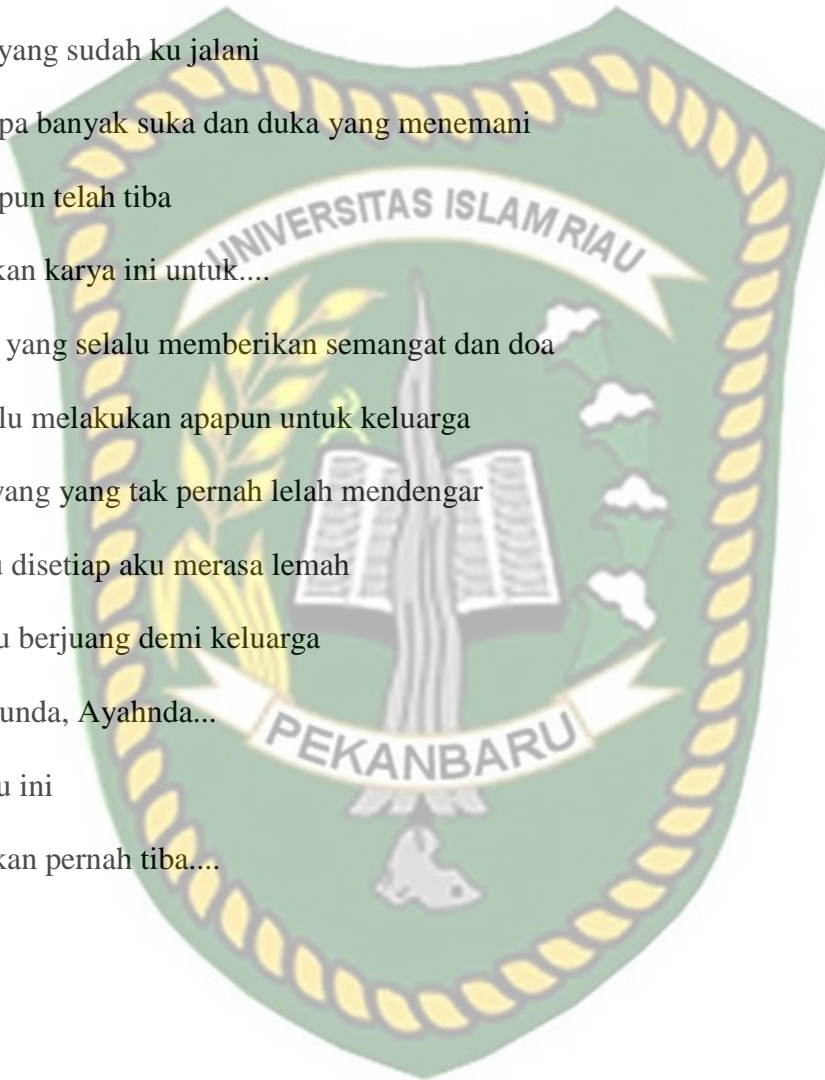
Prodi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Muliando, S.IP., M.Si

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Banyak waktu yang sudah ku jalani
Dan entah berapa banyak suka dan duka yang menemani
Kini waktu itu pun telah tiba
Ku persembahkan karya ini untuk....
Ibunda tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa
Serta yang selalu melakukan apapun untuk keluarga
Ayahnda tersayang yang tak pernah lelah mendengar
Keluh kesah ku disetiap aku merasa lemah
Dan yang selalu berjuang demi keluarga
Terimakasih Ibunda, Ayahnda...
Tanpamu waktu ini
Mungkin tak akan pernah tiba....



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha kuasa atas segala rahmat dan kebesaran yang di berikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun judul skripsi ini adalah “EVALUASI UNIT USAHA SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK DESA BALAI MAKAM BERSATU TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA BALAI MAKAM KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS”.

Penulis menyadari tanpa bimbingan arahan dan bantuan dari berbagai pihak tentunya sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sehingga sepatutnya jika penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan dan Bapak Andriyus, S.sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

5. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf.M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Yendri Nazir,S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan membimbing penulis dalam proses bimbingan berlangsung.
6. Kepada kedua Orang Tuaku, ayahnda tersayang Abdul Majid yang telah berjuang keras demi keluarga,selalu memberikan semangat serta doa bagi penulis dan ibunda tercinta Efrinawati,S.Pd yang selalu mencurahkan kasih sayang yang tulus dan memberi semangat serta doa bagi penulis.
7. Seluruh teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 kelas B Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Dan akhir kata sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas segala amal baik semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, 22 Maret 2019

Dian Mustnaini

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DARTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN.....	14
A. Studi Kepustakaan	14
1. Konsep Pemerintahan.....	14

2.	Konsep Kebijakan	16
3.	Konsep Evaluasi	17
4.	Konsep Pemberdayaan	20
5.	Konsep Badan Usaha Milik Desa	23
6.	Konsep Kemiskinan	27
7.	Konsep Pengentasan Kemiskinan	31
8.	Konsep Kesejahteraan	33
B.	Penelitian Terdahulu	39
C.	Kerangka Pikiran	40
D.	Konsep Operasional	41
E.	Operasional Variabel	43
F.	Teknik Pengukuran	44
BAB III	METODE PENELITIAN	46
A.	Tipe Penelitian	46
B.	Lokasi Penelitian.....	46
C.	Populasi dan Sampel	46
D.	Teknik Penarikan Sampel	47
E.	Jenis dan Sumber Data.....	48
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	48
G.	Teknik Analisa Data	49
H.	Jadwal dan Waktu Penelitian	50
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	51
A.	Gambaran Umum Desa Balai Makam	51
B.	Keadaan Penduduk.....	54
C.	Keadaan Sosial dan Ekonomi	54
a.	Mata Pencaharian	55
b.	Tingkat Pendidikan	56
c.	Sarana dan Prasarana.....	57
D.	Gambaran Umum Pemerintahan Desa Balai Makam	58

E. Gambaran Singkat BUM Desa Balai Makam Bersatu.....61

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN63

A. Identitas Responden63

a. Jenis Kelamin Responden63

b. Usia Responden.....64

c. Pendidikan Responden64

B. Hasil Penelitian Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha
Milik Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat
Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten
Bengkalis65

1. *Input* (masukan)66

2. *Proses* (proses).....67

3. *Output* (keluaran)68

4. *Outcome* (dampak)70

C. Hambatan Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik
Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa
Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis77

BAB VI PENUTUP.....79

A. Kesimpulan79

B. Saran80

DAFTAR KEPUSTAKAAN81

DAFTAR LAMPIRAN.....84

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Daftar Jumlah Keluarga Miskin di Desa Balai Makam.....	10
I.2 : Daftar Jumlah Pemanfaat Unit Usaha Simpan Pinjam.....	11
II.1 : Penelitian Terdahulu	39
II.2 : Operasional Variabel.....	43
III.1 : Populasi Dan Sampel.....	47
III.2 : Jadwal dan Waktu Penelitian.....	50
IV.1 : Keadaan Kesejahteraan Keluarga.....	55
IV.2 : Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	56
IV.3 : Jumlah Tamatan Pendidikan Penduduk.....	57
IV.4 : Jenis Sarana Pendidikan	57
IV.5 : Jenis Sarana Tempat Ibadah	58
IV.6 : Aparat Pemerintah Desa Balai Makam	59
IV.7 : Kegiatan Usaha yang Direncanakan Akan Dikembangkan.....	61
V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	63
V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia	64
V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	65
V.4 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator Input.....	66
V.5 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator Proses.....	67
V.6 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator Output	69
V.7 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator Outcome.....	70
V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	40
IV.1 : Struktur Pemerintahan Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	60



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dian Mustnaini
NPM : 157310001
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfeherensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Maret 2019

Pelaku Pernyataan



Dian Mustnaini

**EVALUASI UNIT USAHA SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK DESA
BALAI MAKAM BERSATU TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DI DESA
BALAI MAKAM KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS**

ABSTRAK

DIAN MUSTNAINI

Kata Kunci : Evaluasi, Unit Usaha Simpan Pinjam, Pendapatan Masyarakat

Penelitian ini berupaya menjelaskan Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Sejalan dengan tujuan penelitian, maka populasi dalam penelitian meliputi Kepala Desa, Ditrektor BUM Desa, Ketua Unit Usaha Simpan Pinjam, Tata Usaha, Kasir, Staff Analisis Kredit dengan menggunakan teknik sensus dan masyarakat pemanfaat Unit Usaha Simpan Pinjam sejumlah 501 orang dan yang menjadi sampel adalah 25 orang dengan teknik *purposive sampling*. Adapun penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Maka sumber data penelitian diperoleh dari kuisisioner, observasi dan dokumentasi. Dengan demikian diketahui bahwa Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah kurang baik terhadap pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan dimana pinjaman dana belum didapatkan oleh masyarakat miskin karena adanya agunan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan bagi masyarakat yang meminjam masih banyak yang belum bisa mengembangkan usahanya dengan baik karena belum adanya pelatihan kewirausahaan dari pengelola yang mengakibatkan masih adanya masyarakat yang tidak melakukan pengembalian sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

**EVALUATION OF SAFETY SAVING BUSINESS UNITS IN OWNED ENTERPRISES
IN BALAI MAKAM BERSATU VILLAGE ON COMMUNITY INCOME IN BALAI
MAKAM SUB-DISTRICT BATHIN SOLAPAN VILLAGE BENGKALIS DISTRICT**

ABSTRACT

DIAN MUSTNAINI

Keywords: Evaluation, Savings and Loans Business Unit, Income Welfare

This research attempts to find explain Evaluation of the Savings and Loans Business Unit at the Village Owned Company of the Unified Cemetery of the People's Income in the Balai Makam Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency. In line with the research objectives, the population in the study included the Village Chief, BUM Desa Directorate, Chairman of the Savings and Loan Business Unit, Administration, Cashier, Credit Analysis Staff using 501 people using census techniques and the loan beneficiary community. is 25 people with purposive sampling technique. The research uses quantitative methods with descriptive research types. Then the data source of this study was obtained from questionnaires, observation and documentation. Thus it is known that the Evaluation of the Savings and Loans Business Unit at the Village Owned Company of the Unified Balai Makam Against Community Income in the Balai Makam Village of Bathin Solapan Sub-District, Bengkalis Regency is less impacted in improving community income. This is due to the existence of obstacles where loan funds have not been obtained by the poor because of collateral in accordance with applicable regulations. And there are still many people who borrow who have not been able to develop their businesses properly because there is no entrepreneurship training from the managers which results in the existence of communities that do not make repayments according to the stipulated time.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai begitu banyak wilayah yang menyebabkannya mesti bisa melakukan pemerataan agar pemerintahan merata sampai ke daerah terpencil. Kemudian dibentuklah pemerintahan ditingkat Provinsi, Kota Madya, Kabupaten/Kota, bahkan Desa agar tercapai tujuan menjalankan suatu pemerintah. Dalam mencapai tujuan Indonesia, Negara menjalankan suatu pemerintah. Pemerintah adalah orang atau badan yang menjalankan tugas negara.

Dalam pelaksanaannya pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang, yang berarti orang yang diberi wewenang bekerja atas nama yang memberi wewenang. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat provinsi, provinsi ke Kabupaten/Kota/Desa. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, wilayah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil. Hal ini dijelaskan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa wilayah-wilayah Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu

dibagi atas Kabupaten/Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten/Kota itu mempunyai pemerintahannya sendiri.

Dalam pasal 18 b Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Dan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah. Hal tersebut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah harus mempercepat tercapainya kesejahteraan melalui peningkatan pemberdayaan kepada masyarakat agar bisa mengelola sumber daya didaerahnya. Pemberdayaan masyarakat Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pengembangan diri masyarakat agar kesejahteraan bisa dengan cepat tercapai.

Pemberdayaan masyarakat merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Program Pemberdayaan Desa merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan. Maka

Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan usaha pemerintah untuk melepaskan masyarakat dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Jenis kegiatan Program Pemberdayaan Desa pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya pemerintah Provinsi Riau dalam menanggulangi masalah Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I). Dalam implementasinya bentuk-bentuk kegiatan Program Pemberdayaan Desa meliputi kegiatan regular : perencanaan, pembangunan desa/kelurahan melalui sektoral kegiatan bidang ekonomi mikro, melalui Dana Usaha Desa yang di kelola oleh Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan – Simpan Pinjam (UED-SP). UED-SP inilah yang menjadi pengelola dana usaha desa yang berasal dari Pemerintah Provinsi Riau serta Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat. Pemanfaatan Dana Usaha Desa/kelurahan di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dasar pemerintah membuat program ini adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk bisa hidup mandiri dengan mengembangkan usaha kecil yang merupakan sektor usaha strategis dan potensial dalam menyerap tenaga kerja baru. Di samping itu fakta menunjukkan kemampuan usaha kecil untuk bertahan dalam krisis ekonomi dan mampu memulihkan penurunan kondisi usaha dengan cepat. Dengan adanya keberpihakan pemerintah terhadap usaha kecil ini dapat berkembang dan menjadi usaha besar sehingga memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) atau Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis dikaitkan dengan pembentukan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam hal melakukan pemberdayaan keuangan masyarakat desa dan merupakan salah satu Organisasi atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa harus menjalankan fungsi umum, yakni :

1. Pelaksanaan teknis pemberdayaan usaha ekonomi rakyat;
2. Pembinaan bantuan pembangunan perkreditan dan pemasaran produksi;
3. Perumusan program ekonomi kerakyatan di pedesaan;
4. Pelaksanaan pengawasan terhadap program ekonomi kerakyatan;
5. Pembinaan usaha ekonomi kerakyatan dengan upaya pemberian bantuan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
6. Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan atasan;

UED-SP Desa Balai Makam bertujuan untuk meningkatkan ekonomi Desa dengan mengusahakan bantuan permodalan. Dalam pengelolaannya UED-SP mengadopsi antara sistem koperasi, perbankan dan pegadaian. Pengelolaan simpanan menggunakan istilah di koperasi yang dimodifikasi. Terdapat 3 jenis simpanan yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Pengelolaan pinjaman menggunakan sistem pegadaian yang dimodifikasi. Jika di pegadaian dalam satu periode tertentu tidak dapat menyelesaikan pinjaman maka akan dilakukan lelang, di UED-SP Desa Balai Makam penyelesaian pinjaman

dilakukan secara administrasi setiap bulan. Pengelolaan jasa simpanan dan pinjaman menggunakan sistem perbankan, untuk perhitungan jasa simpanan sukarela dilakukan setiap periode, dan jasa simpanan sukarela dapat diambil setiap saat. Kelembagaan UED-SP yang di bentuk di seluruh Desa di Kabupaten Bengkalis dimulai pada tahun 2012 melalui musyawarah Desa untuk membantu masyarakat dalam berusaha, terutama usaha skala kecil dan menengah telah berkontribusi positif bagi perkembangan usaha masyarakat Desa, dengan modal awal sebesar Rp. 1.000.000.000,-,

Dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa ke Badan Usaha Milik Desa yang Berasal dari Dana Usaha Ekonomi Desa memiliki tujuan :

1. Membantu permodalan usaha masyarakat desa
2. Meningkatkan pendapat masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan
3. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir
4. Meningkatkan kebiasaan menabung masyarakat desa
5. Meningkatkan pendapatan asli desa

Dan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2017 ini, disebutkan pula bahwa dengan telah terbentuknya Badan Usaha Milik Desa pada masing-masing Desa di Kabupaten Bengkalis, maka pengelolaan aset UED yang ada pada masing-masing Desa akan lebih efektif dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dengan penyertaan modal Desa melalui Unit Usaha Simpan Pinjam. Sebagai salah satu unit usaha di bawah BUM Desa maka pengelolaan UED-SP

sepenuhnya menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab desa melalui peraturan yang di buat oleh Desa sebagai penyertaan modal. Dimana pada modal pinjaman dibebankan 10% pertahun sedangkan khusus masyarakat miskin 6% pertahunnya. Dan ditingkat Desa sesuai dalam bab Ketentuan Peralihan Pasal 43 pada Peraturan Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa disebutkan dengan jelas bahwa kelembagaan UED-SP yang ada saat ini, dengan berdirinya BUM Desa “Balai Makam Bersatu” maka secara langsung menjadi unit usaha dibawah BUM Desa “Balai Makam Bersatu”. Sebagai salah satu unit usaha dibawah BUM Desa maka pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam sepenuhnya menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab Desa melalui pengaturan yang dibuat oleh Desa sebagai penyertaan modal Desa.

Pada Peraturan Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 yang menjelaskan maksud pendirian BUM Desa Balai Makam Bersatu adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Balai Makam melalui usaha pengembangan usaha ekonomi produktif industri, perikanan, pertanian dan perkebunan serta sektor lainnya.

Untuk keperluan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, maka terlebih dahulu perlu dilakukan inventarisasi terhadap data keuangan, aset kelembagaan dan data pemanfaatan UED-SP sehingga pengelolaan ke depan dapat dilakukan secara tertib, akuntabel, transparan dan tidak menimbulkan persoalan hukun di belakang hari dan sesuai dengan aturan perundang-undangan

yang berlaku. Sasaran di susunnya tata cara dalam melaksanakan inventarisasi adalah di dapatkannya kepastian data terkait dengan keuangan, aset kelembagaan dan pemanfaat UED-SP yang akan di serahkan oleh Pemerintah Desa kepada BUM Desa dan selanjutnya di serahkan kepada BUM Desa dalam bentuk penyertaan modal bagi unit usaha simpan pinjam. Kegiatan inventarisasi adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan data keuangan, aset kelembagaan dan data pemanfaatan UED-SP dan mendokumentasikannya.

Berdirinya UED-SP yang berlandaskan peraturan Bupati diharapkan harus mampu mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat Desa sesuai dengan cita-cita yang tertera pada Peraturan Bupati tersebut, meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah, meningkatkan kebiasaan gotong royong serta diharapkan masyarakat desa agar gemar menabung secara tertib.

BUM Desa Balai Makam Bersatu memiliki tujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga

- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa

Penyertaan modal BUM Desa dapat diperoleh dari :

- Pemerintah Desa
- Pemerintah Kabupaten
- Pemerintah Provinsi
- Penyertaan modal masyarakat Desa
- Pemupukan modal kerja yang disisihkan dari dana cadangan umum BUM Desa
- Sumber lainnya

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa ke Badan Usaha Milik Desa yang Berasal dari Dana Usaha Ekonomi Desa tujuan Unit Usaha Simpan Pinjam adalah membantu masyarakat agar bisa membuka atau mengembangkan usahanya sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa. Modal BUM Desa Balai Makam Bersatu berasal dari Pemerintah Desa melakukan penyertaan modal awal BUM Desa sejumlah yang tercantum dalam Peraturan Desa Tentang tahun 2017 sebesar Rp. 90.000.000,-,

Pengelolaan unit usaha simpan pinjam dilakukan berdasarkan azas :

1. Transparan.

2. Akuntabel.
3. Berkelanjutan.

Kepengurusan unit usaha simpan pinjam terdiri dari :

- a. 1 orang kepala unit usaha simpan pinjam
- b. 1 orang tata usaha.
- c. 1 orang kasir.
- d. 1 orang staf analisis kredit, dan
- e. Staf pembantu yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

Terdapat 14 kriteria keluarga miskin menurut Kementerian Sosial

Republik Indonesia, antara lain :

1. Luas lantai rumah kurang dari 8m² per orang
2. Lantai rumah terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Dinding rumah dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plaster
4. Tidak punya tempat buang air besar/ punya bersama
5. Rumah tidak menggunakan listrik
6. Air minum bersumber dari air sumur / mata air yang tidak terlindung/ sungai/ air hujan
7. Bahan bakar untuk masak adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Mengonsumsi daging/ susu/ ayam satu minggu sekali
9. Membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Makan hanya satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar pengobatan di puskesmas/ poliklinik

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,-
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD
14. Tidak punya tabungan/ barang mudah jual minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Adapun data jumlah penduduk miskin di Desa Balai Makam ada pada tabel dibawah ini :

Tabel I.1 : Daftar Jumlah Keluarga Miskin di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah Keluarga Miskin	Persentase
1	2015	1.875	508	27%
2	2016	1.954	506	26%
3	2017	1.972	503	25%
4	2018	2.195	501	23%

Sumber : Kantor Desa Balai Makam 2019

Dari tabel dapat dilihat jumlah KK pada tahun 2015 sampai tahun 2018 terus bertambah sedangkan jumlah keluarga miskin atau angka kemiskinan di Desa Balai Makam dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat kecil.

Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki

oleh Desa guna mengelola aset dan yang paling penting adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut data jumlah pemanfaat Unit Usaha Simpan Pinjam BUM Desa Balai Makam Bersatu dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel I.2 : Daftar Jumlah Pemanfaat Unit Usaha Simpan Pinjam pada BUM Desa Balai Makam Bersatu tahun 2015 - 2018

No	Jenis Usaha	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Pedagang	18	140	123	13
2	Peternakan	1	28	41	4
3	Perkebunan	2	47	27	3
4	Jasa	2	29	20	3
	Laki-laki	8	140	126	13
	Perempuan	15	104	85	10
	Jumlah	23	244	211	23

Sumber : Kantor BUM Desa Balai Makam Bersatu 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pemanfaat unit usaha simpan pinjam pada BUM Desa Balai Makam Bersatu pada tahun 2015 sampai tahun 2018 tidak begitu banyak masyarakat yang memanfaatkan unit usaha simpan pinjam, hanya sebagian kecil dari mereka yang memanfaatkan dana unit usaha simpan pinjam. Dan pada tahun 2016 adalah jumlah pemanfaat unit usaha simpan pinjam dengan jumlah yang paling banyak.

Adapun fenomena-fenomena yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Unit usaha simpan pinjam ini belum memberikan dampak pada masyarakat di Desa Balai Makam karena tingkat perubahan pada angka kemiskinan yang sangat kecil.
2. Belum adanya program-program pelatihan kewirausahaan dan

manajemen usaha yang mengakibatkan usaha masyarakat Desa belum dapat berkembang dengan baik sehingga penghasilan masyarakat masih rendah dan belum bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

3. Verifikasi calon peminfaat yang belum berjalan sesuai dengan keharusannya karena yang mendapatkan pinjaman bukan masyarakat yang berhak, dan masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan dana unit usaha simpan pinjam ini untuk konsumtif bukan untuk membuka atau mengembangkan usaha.
4. Dengan adanya Unit Usaha Simpan Pinjam pada BUM Desa Balai Makam Bersatu diharapkan perekonomian masyarakat Desa membaik dan terhindar dari pinjaman kepada rentenir.
5. Penentuan agunan terhadap peminfaat dana unit usaha simpan pinjam. Yang membuat masyarakat yang bisa mememanfaatkannya dana ini adalah masyarakat yang memiliki jaminan harta yang dimiliki oleh masyarakat ekonomi menengah keatas, sedangkan tujuannya dari kegiatan ini salah satunya adalah upaya pengentasan kemiskinan.

Setelah dipaparkannya latar belakang penulis terdorong untuk mengamati kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam pada BUM Desa Balai Makam Bersatu dengan judul **“Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan diatas memperoleh rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu “Bagaimana Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapat Masyarakat Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Agar mengetahui dampak pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam pada BUM Desa Balai Makam Bersatu.
2. Untuk mengetahui hambatan pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam pada BUM Desa Balai Makam Bersatu.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan bisa menyampaikan masukan agar dapat membantu pemerintah Kabupaten Bengkalis, khususnya Kecamatan Bathin Solapan Desa Balai Makam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan dampak BUM Desa.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Dalam Labolo (2014:35) pengertian sederhana pemerintahan merupakan usaha menata kehidupan untuk mencapai tujuan bersama, dimana untuk mencapainya pemerintah membutuhkan badan untuk membantu menjalankan tujuan yang sudah disepakati.

Coparaso (dalam Labolo 2014:41) memandang pemerintahan sebagai mekanisme politik formal dari sebuah negara secara keseluruhan, yaitu semua institusi, undang-undang, kebijakan publik dan pelaku-pelaku utama dalam pemerintahan.

Menurut Strong (dalam Syafiie 2015:10) pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer dalam menjaga keamanan, kedua harus mempunyai kekuatan legislatif dalam hal untuk perundang-undangan, ketiga harus mempunyai kekuatan finansial untuk membantu membiayai urusan kepentingan negara.

Selanjutnya menurut Apter (dalam Syafiie 2015:11) menyebutkan bahwa pemerintahan itu adalah satuan badan yang memiliki tanggung jawab untuk pertahanan dan monopoli dalam melaksanakan pemerintahannya.

Soemendar (dalam Syafiie 2015:11) pemerintahan adalah badan penting, dalam melaksanakan pemerintahan pemerintah semestinya memperhatikan bagaimana pendapat dan kebutuhan rakyatnya.

Dikatakan oleh Koswara (dalam Zirvia 2015:22) bahwa yang dimaksud pemerintahan dalam arti luas yaitu meliputi seluruh kegiatan pemerintah dibidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Yang kedua dalam arti sempit yaitu kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif.

Objek material ilmu pemerintahan adalah negara. Objek formal ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan-hubungan pemerintahan dengan sub-subnya (baik hubungan antara pusat dan daerah, hubungan antara yang di perintah dengan yang memerintah, antar lembaga serta hubungan antar departement), termasuk didalamnya pembahasan output pemerintahan seperti fungsi-fungsi, sistem-sistem, aktivitas dan kegiatan, gejala dan perbuatan serta peristiwa-peristiwa pemerintahan dari elite pemerintahan yang berkuasa.

Menurut Ndraha (dalam Labolo 2014:21) menegaskan bahwa keseluruhan gejala pemerintahan berawal dari Tuhan dan berakhir pada manusia sebagai objek dan subjek yang melayani. Jika dihubungkan dengan agama, gejala ini mengingatkan kita tentang makna spiritual ibadah shalat bagi kaum muslimin yang memulai gerakan shalatnya dengan pengakuan kebesaran Tuhan (*Allahu Akbar*) dan diakhiri dengan keselamatan bagi lingkungan sekitarnya (*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*).

Bevir (dalam Wasistiono dkk 2015:87) membagi pengertian pemerintahan kedalam dua pengertian yakni dalam arti sempit sebagai sebuah institusi (*government as an institution*), sedangkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai sebuah proses (*government as a process*). Lalu Bevir menjelaskan dalam arti sempit, kata pemerintahan merujuk pada wujud kewenangan negara dan diarahkan pada sekelompok orang yang memiliki kewenangan pada unit tertentu. Pada bagian lain Bevir juga menjelaskan mengenai pemerintahan dalam arti luas, pemerintah adalah cara untuk memerintah antitas tertentu pada saat tertentu pula. Kata pemerintah merujuk pada metode tertentu, tujuan dan tingkatan pengendalian masyarakat oleh negara.

2. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar tugas-tugas pokok pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan-kebijakan dapat ditemukan dalam berbagai bidang seperti kesejahteraan, kesehatan, peendidikan sosial dan sebagainya.

Secara umum istilah “kebijakan” digunakan untuk menunjuk perilaku suatu lembaga pemerintahan. Kebijakan dan pembangunan adalah konsep yang saling berkaitan, dalam dalam melakukan pembangunan dibutuhkan kebijakan untuk memberikan pedoman dalam berbagai proyek pembangunan. Sebagai suatu perubahan yang dibuat secara terencana, pembangunan bertujuan untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk mencapainya pembangunan memerlukan program-program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Dan untuk membuat program-program ini tentu saja pembangunan memerlukan pedoman agar terarah dan tepat pada tujuan.

Dengan demikian menurut (dalam Suharto 2015:3) pembangunan diartikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas keadaan secara terstruktur.

Helco (dalam Wahab 2011:35) mengatakan bahwa kebijakan bukanlah istilah yang jelas dengan sendirinya, karena itu Helco menyarankan dan sekaligus menunjukkan bahwa kebijakan itu lebih baik dipandang sebagai kegiatan yang sengaja dilakukan atau ketidakmauan untuk bertindak secara sengaja dari pada dipandang sebagai kepurusan-keputusan atau tindakan-tindakan tertentu.

Menurut Sutopo (dalam Zirvia 2015:28) kebijakan publik adalah konsep yang dibuat oleh pemerintah yang disajikan untuk kepentingan masyarakat dan agar masalah yang ada di masyarakat dapat terpecahkan.

Ealau dan Prewitt (dalam Suharto 2005:7) mengatakan kebijakan adalah ketetapan yang berlaku yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik yang membuat ataupun yang menaatinya.

Selanjutnya Titmuss (dalam Suharto 2005:7) mendefenisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan kepada tujuan yang telah disepakati.

3. Konsep Evaluasi

Menurut KBBI evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan

negatif atau juga gabungan dari keduanya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978:48).

Nurcholis (2007:277) menjelaskan evaluasi adalah proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu. Oleh karena itu kita harus membuat skema umum penilaian yaitu *input*, *proses*, *output* dan *outcomes*.

Dan seperangkat instrumen yang mencakup parameter dan indikatornya adalah :

- a. *Input* yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Yang terdiri dari sumber daya pendukung (SDM, uang, sarana/prasarana)
- b. *Proses* yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
- c. *Output* yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan?
- d. *Outcomes* (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan.

Evaluasi paling sering digunakan untuk melakukan sebuah penilaian. Inti evaluasi adalah menilai hasil kegiatan apakah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Dengan kata lain, evaluasi program pemerintah adalah suatu proses penilaian memberikan informasi tentang pelaksanaan sekarang dan keefektifannya guna membantu dalam pengambilan keputusan untuk waktu yang akan datang. Oleh karena evaluasi merupakan suatu bentuk analisis

kebijaksanaan, maka prosedur-prosedur analisis kebijaksanaan dapat diterapkan. Tujuan program yang di evaluasi harus dirumuskan, ukuran keefektifan ditemukan, dan kriteria untuk perbandingan ditentukan (Moekijat 1995:180).

Harry dan kawan-kawannya dalam (Moejikat 1995:182) ada lima pendekatan untuk mengukur pengaruh yang disebabkan oleh adanya program:

- a. Perbandingan sebelum dan sesudah program
- b. Prediksi dari data sebelum program dengan data sesudah program yang sesungguhnya
- c. Perbandingan dengan bagian-bagian populasi yang tidak dilayani oleh program
- d. Pelaksanaan suatu percobaan yang diawasi
- e. Perbandingan pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan dengan pelaksanaan pekerjaan yang sesungguhnya.

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Boyle (dalam Suharto 2005:120). Sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*) dan dampak (*impacts*), dari pelaksanaan rencana strategis, oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kinerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Sosial masukan
2. Sosial keluaran
3. Sosial hasil

Lebih jauh lagi evaluasi berusaha mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan demikian evaluasi bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan
2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran
3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar rencana (Suharto, 2017:199)

Dalam hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan cara membandingkan berbagai hal yang berkaitan dengan program apakah sudah sesuai dengan rencana dan apakah sudah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4. Konsep Pemberdayaan

Dalam Suharto (2017:57) secara koseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power'. Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal yaitu bahwa kekuasaan dapat berubah dan kekuasaan dapat diperluas.

Menurut Ife (dalam Suharto 2017:59) pemberdayaan memiliki dua kunci, yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan tentang kekuasaan politik dalam arti sempit. Pemberdayaan adalah sebuah proses tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka

pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial ; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Menurut Kieffer (dalam Suharto 2017:63), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik dan kompetensi partisipatif. Parsons et.al. juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan merujuk pada :

- Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual lalu berkembang menjadi perubahan sosial yang besar.
- Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri.
- Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial.

Pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut (Mardikanto dan Soebianto 2017:105)

- Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk menerapkan sesuatu.
- Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat karena perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatna.

- Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengkaitkan kegiatannya dengan kegiatan yang lainnya.

Menurut Prijono dan Pranarka (dalam Deprianto 2017:27) menyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan kepada pihak lain melakukan sesuatu.

Upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan merupakan usaha menangani ketidakberdayaan masyarakat. Beberapa program dapat dilaksanakan sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, menurut Suharto (2017:151) adalah :

- a. Pemberian bantuan sosial.
- b. Pemberian modal usaha, pelatihan usaha, serta pembinaan keluarga mandiri.
- c. Program kedaruratan, seperti bantuan uang dan barang.

Dalam Ngutra (2017) Sutrisno berpendapat bahwa model pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan adalah:

- (1) Pemerintah dan pihak luar (LSM) dalam menggunakan model pemberdayaan harus mengarahkan pada proses transformasi hubungan antara kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang bersangkutan.

- (2) Model pemberdayaan mensyaratkan pula penghapusan pendekatan masa mengambang seperti yang terjadi pada masa orde baru.
- (3) Model pemberdayaan hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila digerakkan oleh kelas intelektual desa.
- (4) Pembangunan masyarakat pedesaan hanya akan efektif apabila desa mampu mengelola modal untuk membiayai pembangunan secara mandiri.

5. Konsep Badan Usaha Milik Desa

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 126 menyebutkan pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan oleh kelas intelektual desa atau Pemerintah Desa untuk mendukung kegiatan pemerintah dan pembangunan pada umumnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDES adalah usaha Desa yang didirikan oleh pemerintah Desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat (3) menyebutkan BUMDES dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar pemerintah dalam membuat program ini adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dimana program ini merupakan program yang diharapkan

banyak berperan membantu masyarakat, agar masyarakat miskin bisa bangkit dari kemiskinan dan memiliki hidup yang lebih layak serta sejahtera.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah perdesaan adalah dengan memutuskan program pemberdayaan desa yang antara lain diwujudkan melalui unit usaha simpan pinjam. Dimana dalam kegiatan ini setiap desa dapat memanfaatkan dananya secara bergulir untuk membuka atau mengembangkan usaha yang dimiliki.

Pedoman umum program pemberdayaan Desa menyebutkan bahwa dana usaha Desa/Kelurahan diberikan melalui pendekatan pelimpahan pengelolaan program dari tingkat provinsi dan kabupaten ke tingkat Desa/Kelurahan, dari pembinaan dari tingkat provinsi dan kabupaten yang pengelolaannya dilakukan ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat dimanfaatkan secara langsung oleh sekelompok masyarakat ataupun perorangan dengan mengikut sertakan masyarakat dalam pelaksanaan dan pengabdian kegiatan
2. Usulan kegiatan harus di bahas melalui forum musyawarah Desa/Kelurahan sebagai forum tertinggi untuk mengambil keputusan Desa/Kelurahan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim verifikasi usulan

BUM Desa merupakan salah satu badan perekonomian Desa yang dibina oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Pendirian BUM Desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas yang didukung dan oleh

kebijakan daerah Kabupaten/Kota yang ikut membantu dan melindungi usaha masyarakat dari pesaing para pemodal besar. Mengingat BUM Desa adalah sebuah badan ekonomi yang masih baru beraksi di pedesaan, maka badan ini membutuhkan tumpuan yang kuat agar bisa berkembang dengan baik dengan harapan mengembangkan dan memperkuat perekonomian masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa :

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa
2. BUM Desa dikelola dengan kegotoroyongan
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan
4. Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa
5. Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk :

1. Pengembangan usaha
2. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pemberian bahan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir

Dalam Tama dan Yanuardi (2013:23) aktivitas BUMDES memberikan pengaruh eksternal yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaatnya terhadap aspek ekonomi pedesaan antara lain :

- 1) Memperluas lapangan kerja
- 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat

3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah

Untuk keperluan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, maka terlebih dahulu perlu dilakukan inventarisasi terhadap data keuangan, aset kelembagaan dan data pemanfaatan unit usaha simpan pinjam sehingga pengelolaan ke depan dapat dilakukan secara tertib, akuntabel, transparan dan tidak menimbulkan persoalan hukum di belakang hari dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran disusunnya tata cara dalam melaksanakan inventarisasi adalah di dapatkannya kepastian data terkait dengan keuangan, aset kelembagaan dan pemanfaat unit usaha simpan pinjam yang akan di serahkan oleh Pemerintah Desa kepada BUM Desa dan selanjutnya di serahkan kepada BUM Desa dalam bentuk penyertaan modal bagi unit usaha simpan pinjam. Kegiatan inventarisasi adalah kegiatan melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan data keuangan, aset kelembagaan dan data pemanfaatan UED-SP dan mendokumentasikannya.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk menampung semua kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang di kelola Desa dan/atau kerjasama antar-Desa. Dimana pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa.

Maksud pendirian BUM Desa Balai Makam Bersatu dalam Peraturan Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Balai Makam melalui usaha

pengembangan usaha ekonomi produktif industri, perikanan dan pertanian dan perkebunan serta sektor lainnya.

6. Konsep Kemiskinan

Menurut Ellis (dalam Suharto 2017:133) kemiskinan menyangkut dimensi dari aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Tipologi kemiskinan dapat dikategorikan pada empat kategori, yang pertama kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh tidak makmurnya kehidupan seseorang yang menyebabkan orang itu tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Kedua, kemiskinan relatif adalah keadaan miskin yang dialami dengan membandingkan 'kondisi umum' suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp. 100.000 per bulan, maka seseorang yang memiliki pendapatan Rp.125.000 per bulan secara absolut tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp. 200.000 per bulan, maka secara relatif orang tersebut termasuk miskin.

Ketiga, kemiskinan kultural yaitu dilihat dari sikap, gaya hidup, nilai, penyesuaian sosial budaya yang tidak sejalan masyarakat modern. Sikap malas, dan tidak memiliki jiwa wirausaha adalah salah satu karakter yang umumnya dianggap sebagai ciri-ciri kemiskinan kultural.

Keempat, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak

memungkinkan seseorang mendapatkan sumber-sumber kehidupan yang tersedia untuk mereka.

Pada umumnya, orang miskin di tandai oleh rendahnya pendapatan, rendahnya pendidikan, keterampilan dan akses pada sumber-sumber informasi dan kesempatan sosial, akan sangat sulit memperoleh pekerjaan.

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox (dalam Suharto 2017:132) membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi :

1. Kemiskinan yang diabaikan globalisasi, yaitu negara maju yang pada umumnya selalu menjadi pemenang sementara negara berkembang tersingkirkan oleh persaingan pasar bebas.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Seperti halnya kemiskinan yang terjadi di pedesaan akibat rendahnya pembangunan, kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan, kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat faktor-faktor eksternal, seperti konflik bencana alam, dan tingginya jumlah penduduk.

Secara luas kemiskinan sering didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai dengan kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan. Definisi kemiskinan dengan menggunakan

pendekatan kebutuhan dasar seperti ini diterapkan oleh Depsos, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3).

Kemiskinan merupakan masalah yang sering dan sudah ada sejak lama. Sampai sekarang pun belum ditemukan cara penanggulnagn kemiskinan yang benar-benar mengurangi tingkat kemiskinan. Strategi penanganan kemiskinan masih harus terus-menerus dikembangkan. Karena masalah kemiskinan ini memang belum ditemukan solusi ampuhnya, padahal kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius di Negara. Terdapat banyak sekali teori dalam memahami kemiskinan.

Kuncoro (dalam Zirvia 2015:41) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah tidak mempunya seseorang untuk memenuhi standar minimum hidup. Defenisi tersebut menyiratkan tiga pertanyaan dasar, yaitu :

1. Bagaimanakah mengukur standar hidup ?
2. Apa yang dimaksud dengan standar hidup minimum?
3. Indikator sederhana yang bagaimanakah yang mampu mewakili masalah kemiskinan yang begitu rumit ?

Dalam Ngutra (2017) salah kemiskinan terjadi bukan hanya begitu saja, namun dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Suharto kemiskinan diakibatkan oleh faktor berikut:

- (1) Faktor individual, orang miskin disebabkan oleh perilaku.

- (2) Faktor sosial, yaitu kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin.
- (3) Faktor kultural, kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan.
- (4) Faktor struktural, menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil sehingga menyebabkan orang menjadi miskin.

Beberapa indikator kemiskinan akan diuraikan berikut ini :

- a. Indikator kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi, yaitu ekonomi memiliki pandangan bahwa kemiskinan adalah pendapatakan seseorang yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Indikator kemiskinan berdasarkan dimensi peran pemerintah, di Indonesia penanggulangan masalah kemiskinan dibiayai melalui APBN. Prinsip yang digunakan adalah untuk meningkatkan pembangunan SDM.
- c. Indikator kemiskinan berdasarkan dimensi kesehatan, bermacam data kemiskinan menyebutkan hubungan antara kemiskinan dengan kesehatan. Hubungan anantara hal ini yaitu rendahnya jumlah pendapatan membuat seseorang sulit memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga tidak memdapatkan standar gizi dan pelayanan kesehatan yang baik.

7. Konsep Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah proses pemberdayaan kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang berada pada lapisan bawah. Tujuan dari pengentasan kemiskinan tentu saja untuk mengurangi tingkat kemiskinan tersebut. Program yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan memfokuskan pembangunan dalam bidang pengentasan kemiskinan, fokus tersebut antara lain :

- e. Menstabilas harga bahan kebutuhan pokok.
- f. Mendorong pertumbuhan untuk rakyat miskin.
- g. Memperluas program pembangunan masyarakat.
- h. Meningkatkan akses pelayanan dasar.
- i. Membangun perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah berhubungan dengan lima program tersebut :

- a. Menstabilas harga bahan pokok, ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin agar bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik. Program yang berkaitan dengan fokus ini misalnya seperti menyediakan cadangan beras pemerintah sebanyak 1 juta ton.
- b. Mendorong pertumbuhan untuk rakyat miskin, bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar bisa membuka dan mengembangkan usaha. Yang berkaitan dengan program ini misalnya seperti menyediakan dana bergulir bagi masyarakat atau koperasi

simpan pinjam dan melakukan pembinaan kepada masyarakat agar bisa mengembangkan usahanya dengan baik.

- c. Memperluas program pembangunan masyarakat, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di perdesaan atau perkotaan dengan memperkuat pengembangan kesempatan memiliki usaha. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti program pembangunan infrastruktur dan program pembangunan daerah tertinggal.
- d. Meningkatkan akses pelayanan dasar, fokusnya adalah untuk membantu meningkatkan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar. Program yang berkaitan misalnya dengan memberikan beasiswa untuk semua tingkatan sekolah dan bagi mahasiswa berprestasi dan miskin serta pelayanan kesehatan rujukan gratis bagi keluarga miskin pada kelas III.
- e. Membangun perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, yang bertujuan untuk melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah adalah seperti bantuan sosial untuk korban bencana alam, pemberdayaan sosial keluarga dan fakir miskin serta memberikan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (program keluarga harapan).

Pada program pemberantasan kemiskinan juga mengarah kepada praktek pemberdayaan masyarakat, yang memandang cenderung mengarah pada

pemberdayaan ekonomi. Karena itulah pemberdayaan selalu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan. Bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah berupa bina usaha.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat akan memenuhi keberhasilan apabila di dukung oleh delapan kelembagaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Syahyuti dalam (Mardikanto dan Subianto 2017:118) yaitu, kelembagaan:

1. Penyediaan input
2. Penyediaan modal
3. Pemenuhan tenaga kerja
4. Penyediaan lahan
5. Usaha
6. Pengolahan hasil
7. Pemasaran hasil
8. Penyediaan informasi

Menurut Susi dan Rita (2012:74) tujuan penanggulangan kemiskinan adalah untuk melepaskan masyarakat dari jerat kemiskinan agar mereka memiliki harkat dan martabat sehingga mereka menjadi masyarakat yang benar-benar mendapatkan haknya. Salah satu strategi dalam mencapai hal tersebut adalah dengan memberikan kepada mereka kesempatan penuh dalam proses pembangunan ekonomi.

8. Konsep Kesejahteraan

Dalam Rosni (2017:57) menurut BKKBN keluarga sejahtera adalah keluarga yang terbentuk dalam ikatan pernikahan yang sah, kebutuhan spiritual

dan material yang terpenuhi, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang baik antara sesama manusia.

Kesejahteraan adalah keadaan dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, serta mampu melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang memadai yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya yang akan membuat hidupnya lepas dari kemiskinan, kebodohan dan kekhawatiran sehingga hidupnya terpenuhi secara lahir dan bathin.

Menurut Prabawa (dalam Rosni 2017:57) kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat masyarakat. Keadaan sejahtera ditandai dengan mampu memenuhi semua kebutuhan penting didalam keluarga baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Dapat memenuhi kebutuhan yang penting menunjukkan kesejahteraan. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (dalam Rosni 2017:57) dapat dirumuskan sebagai pandangan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator, yaitu :

- Rasa aman
- Kesejahteraan
- Kebebasan
- Jati diri

Menurut Kollé (dalam Rosni 2017:57), kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa aspek kehidupan:

- 1) Dari segi materi, misalkan kualitas rumah.
- 2) Dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh.
- 3) Dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan dan lingkungan budaya.
- 4) Dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian dan sebagainya.

Secara Nasional terdapat dua versi pengukuran kesejahteraan keluarga, yaitu pengukuran kesejahteraan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2013 untuk mengukur kesejahteraan dapat dilihat dari tujuh indikator, antara lain :

- 1) Kependudukan
- 2) Pendidikan, indikator yang dilihat yaitu angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan angka buta huruf
- 3) Kesehatan, untuk itu dapat dilihat dari angka kesakitan, penolong kelahiran dan angka harapan hidup
- 4) Fertilitas dan keluarga berencana
- 5) Pola konsumsi
- 6) Ketenagakerjaan, status pekerjaan menjadi 7 macam yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha

dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas serta pekerja keluarga.

7) Perumahan

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2014) menentukan indikator tingkat kesejahteraan keluarga menjadi lima tahapan, adapun indikatornya sebagai berikut :

a. Enam indikator tahapan keluarga sejahtera I dengan kriteria sebagai berikut :

- Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
- Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah/ pergi/ bekerja/ sekolah.
- Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai
- Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- Bila pasangan berusia subur ingin berKB pergi sarana pelayanan kontrasepsi.
- Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

b. Delapan indikator keluarga sejahtera II, meliputi :

- Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah agama.
- Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan lauk daging/ ikan/ telur
- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.

- Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni.
- Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat.
- Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- Anggota keluarga umur 10-60 tahun, bisa baca tulis latin.
- PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.

c. Keluarga sejahtera tahap III, meliputi :

- Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang dan barang.
- Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi.
- Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggal.
- Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ TV/ radio.

d. Keluarga sejahtera tahap III plus meliputi :

- Keluarga suka teratur dengan suka rela memberukan sumbangan materil untuk kegiatan sosial.
- Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus pengumpulan sosial/ yayasan/ institusi.

Adapun lima tahapan kesejahteraan keluarga yaitu sebagai berikut :

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator keluarga sejahtera I
2. Tahapan keluarga sejahtera I yaitu keluarga mampu memenuhi 6 indikator tahapan keluarga sejahtera I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 indikator keluarga sejahtera II
3. Tahapan keluarga sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator keluarga sejahtera I dan 8 indikator keluarga sejahtera II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 indikator keluarga sejahtera III
4. Tahapan keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 indikator keluarga sejahtera I, 8 indikator keluarga sejahtera II dan 5 indikator keluarga sejahtera III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 indikator keluarga sejahtera III
5. Tahapan keluarga sejahtera III plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 indikator keluarga sejahtera I, 8 indikator keluarga sejahtera II, 5 indikator keluarga sejahtera III serta 2 indikator tahapan keluarga sejahtera III plus.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Herdandi (2016)	Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Di Kota Cilegon	Menggunakan Teori Evaluasi oleh Nurcholis	Metode Penelitian Kualitatif, Lokasi Penelitian, Tujuan Penelitian.
2	Radi Deprianto (2017)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.	Pemberdayaan Masyarakat, Metode Penelitian Kuantitatif.	Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel.
3	Dewi Kirowati dan Lutfiah Dwi S (2018)	Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.	Pelaksanaan Program Pemberdayaan BUMDes, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.	Lokasi Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif.

Sumber : Data Penelitian 2019

C. Kerangka Pikiran

Gambar II.1 : Model Kerangka Pikiran Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam Pada BUM Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis



Sumber : Modifikasi Penelitian 2019

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pengertian dan penganalisaan maka penulis akan memberikan penjelasan tentang konsep-konsep yang dipakai. Adapun konsep-konsep operasional tersebut antara lain :

1. Evaluasi adalah penilaian secara menyeluruh yang menyangkut *input*, *proses*, *output*, dan *outcomes* dari kebijakan Pemerintah Daerah.
2. Penilaian terhadap penelitian ini difokuskan pada bagaimana pendapatan masyarakat sebelum atau setelah adanya program Unit Usaha Simpan Pinjam pada BUM Desa Balai Makam Bersatu.
3. Program pemberdayaan Desa adalah program yang bertujuan untuk menaggulangi kemiskinan sehingga masyarakat terlepas dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan.
4. BUM Desa merupakan salah satu badan perekonomian Desa. Pendirian BUM Desa disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah Kabupaten/Kota yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan para pemodal besar.
5. Baiknya kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam ini dilihat dari bagaimana jumlah pendapatan masyarakat.
6. *Input*, yaitu masukan yang digunakan agar sistem berfungsi. Evaluasi pada tahap awal program bertujuan untuk memastikan bahwa rencana yang akan dilaksanakan sesuai dengan masalah yang ditemukan yang meliputi sumber daya, dana, tenaga, sarana dan prasarana yang ada.

7. *Proses*, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat.
8. *Output*, yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan.
9. *Outcome*, yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan?



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Tentang Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam Pada BUM Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Kategori Ukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh yang menyangkut <i>input, proses, output</i> dan <i>outcomes</i> . (Hanif Nurcholis 2007:277)	Evaluasi Unit usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat	1. <i>Input</i> (masukan)	1. Kualitas pengelola 2. Modal pinjaman 3. Kondisi sarana dan prasarana	Ordinal
		2. <i>Proses</i> (proses)	1. Verifikasi calon peminjam 2. Membuat pelatihan berwirausaha 3. Penentuan agunan	Ordinal
		3. <i>Output</i> (keluaran)	1. Meningkatkan kreativitas berusaha 2. Menghindarkan masyarakat dari pinjaman dengan bunga tinggi.	Ordinal
		4. <i>Outcomes</i> (dampak)	1. Meningkatkan pendapatan masyarakat 2. Masyarakat tidak bergantung kepada rentenir	Ordinal

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

F. Teknik Pengukuran

Dalam rangka menjawab tujuan penelitian ini, maka perlu ditetapkan pengukuran untuk variabel maupun indikator variabel. Untuk indikator variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori pengukuran yaitu baik, kurang baik dan tidak baik.

1. *Input (masukan)*

Ukuran penilaiannya adalah :

- Baik : Apabila hasil tanggapan responden berada pada kategori baik maka rentang persentase 67% - 100%
- Kurang Baik : Apabila hasil tanggapan responden berada pada kategori kurang baik maka rentang persentase 34% - 66%
- Tidak Baik : Apabila hasil tanggapan responden berada pada kategori tidak baik maka rentang persentase 0% - 33%

2. *Proses (proses)*

Ukuran penilaiannya adalah :

- Baik : Apabila hasil tanggapan responden berada pada kategori baik maka rentang persentase 67% - 100%
- Kurang Baik : Apabila hasil tanggapan responden berada pada kategori kurang baik maka rentang persentase 34% - 66%

Tidak Baik : Apabila hasil tanggapan responden berada pada kategori tidak baik maka rentang persentase 0% - 33%

3. *Output* (hasil)

Ukuran penilaiannya adalah :

Baik : Apabila hasil tanggapan responden berada pada kategori baik maka rentang persentase 67% - 100%

Kurang Baik : Apabila hasil tanggapan responden berada pada kategori kurang baik maka rentang persentase 34% - 66%

Tidak Baik : Apabila hasil tanggapan responden berada pada kategori tidak baik maka rentang persentase 0% - 33%

4. *Outcome* (dampak)

Ukuran penilaiannya adalah :

Baik : Apabila hasil tanggapan responden berada pada kategori baik maka rentang persentase 67% - 100%

Kurang Baik : Apabila hasil tanggapan responden berada pada kategori kurang baik maka rentang persentase 34% - 66%

Tidak Baik : Apabila hasil tanggapan responden berada pada kategori tidak baik maka rentang persentase 0% - 33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian penulis menerapkan metode penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka dan menggunakan kuisisioner sebagai cara untuk mengumpulkan data lalu hasilnya dibuat dalam bentuk tabel. Dan dengan tipe penelitian deskriptif yakni mengukur persepsi masyarakat atau menggambarkan dan meringkas sebagai situasi variabel yang ada pada objek penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Penulis melakukan penelitian di Desa ini karena merupakan salah satu Desa sasaran kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam tetapi belum berjalan seperti tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.

C. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Nawawi (dalam Iskandar 2008:68) adalah seluruh subyek penelitian yang akan dijadikan sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.

Sampel menurut Sugiyono (dalam Iskandar 2008:69) sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kelapa Desa, Direktur BUM Desa Balai

Makam Bersatu, Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam, Tata Usaha, Kasir, Staf Analisis Kredit dan masyarakat pemanfaat dana unit usaha simpan pinjam.

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Desa Balai Makam	1	1	100%
2	Direktur Badan Usaha Milik Desa	1	1	100%
3	Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam	1	1	100%
4	Tata Usaha	1	1	100%
5	Kasir	1	1	100%
6	Staf Analisis Kredit	1	1	100%
7	Masyarakat Pemanfaat Unit Usaha Simpan Pinjam	501	25	5%
Jumlah		507	31	

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik yang berbeda karena jumlah populasi yang berbeda. Dalam penelitian teknik penarikan sampel menggunakan dua teknik yaitu teknik sensus untuk Kepala Desa Balai Makam, Direktur BUM Desa Balai Makam Bersatu, Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam, Tata Usaha, Kasir dan Staf Analisis Kredit karena jumlah populasi yang tergolong kecil.

Sedangkan untuk masyarakat pemanfaat Unit Usaha Simpan Pinjam menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu cara penarikan sampel dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti. Dikarenakan jumlah masyarakat pemanfaat dana Unit Usaha Simpan Pinjam yang cukup besar maka dilakukakan dengan cara menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang ingin diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu yang tidak menyimpang dari sampel yang ditetapkan.

E. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumbernya ataupun dikumpulkan dari responden (sumber data). Adapun identitas responden untuk menjawab semua indikator berikut ini : *input, proses, output dan outcome*.
2. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan penulis guna membantu data primer yang berasal buku-buku, peraturan-peraturan yang mengatur atau pasal dan Undang-undang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan data

1. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan angket yang berupa daftar untuk responden guna mendapatkan informasi. Kuisisioner dapat digunakan bila jumlah responden cukup besar. Kuisisioner ini diberikan kepada responden yaitu masyarakat pemanfaat dana unit usaha simpan pinjam pada BUM Desa Balai Makam Bersatu.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat gejala-gejala yang terjadi pada objek penelitian. Pengamatan ini dilakukan terhadap objek ditempat

berlangsungnya peristiwa. Observasi dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu yang berkedudukan di Jl. Kualo Mudo KM.6 Kulim Desa Balai Makam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau menyediakan bahan-bahan seperti foto dan surat lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dilakukan menggunakan tipe deskriptif, yaitu penganalisaan data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Setelah data yang diperoleh dari responden, lalu diolah kemudian dikelompokkan dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian analisa dari kuisisioner dan pengamatan mengenai penelitian ini untuk dianalisa guna mendapatkan jawaban akhir dari penelitian ini.

H. Jadwal dan Waktu Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi kuesioner																				
5	Rekomendasi Survey																				
6	Survey Lapangan																				
7	Analisis Data																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)																				
9	Konsultasi revisi skripsi																				
10	Ujian konferehensif Skripsi																				
11	Revisi Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau adalah Kabupaten Bengkalis. Dimana luas Kabupaten Bengkalis 11.481,77 Km², yang terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatra antara 2° 30' Lintang Utara - 0° 17' Lintang Utara dan 100° 52' Bujur Timur - 102° 10' Bujur Timur. Dengan memiliki batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Siak.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Karimun (Prov. Kep Riau)

Visi Kabupaten Bengkalis adalah : “Menjadi Salah Satu Pusat Perdagangan di Asia Tenggara dengan Dukungan Industri yang Kuat dan Sumber Daya Manusia yang Unggul Guna Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Makmur Pada Tahun 2020”. Sedangkan Misi Kabupaten Bengkalis Yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia:
2. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi;

3. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui peningkatan investasi;
4. Meningkatkan infrastruktur daerah dan ;
5. Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah melalui pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Adapun Kabupaten Bengkalis memiliki 11 Kecamatan, Kecamatan tersebut antara lain Bantan, Bengkalis, Bukit Batu, Mandau, Rupat, Rupat Utara, Pinggir, Siak kecil, Bandar Laksamana, Tualang Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Salah satu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bathin Solapan. Dimana kecamatan ini merupakan kecamatan baru yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Mandau.

Terdapat 13 Desa dan tidak ada Kelurahan di Kecamatan Bathin Solapan. Desa-desa ini juga merupakan hasil dari pemekaran. Desa tersebut antara lain, Balai Makam, Tambusai Batang Dui, Simpang Padang, Pematang Obo, Petani, Buluh Manis, Air kulim, Sebangar, Boncah Mahang, Bathin Sobanga, Pemesi, Kesumbu Ampai dan Bumbung.

Desa Balai Makam adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Luas wilayah Desa Balai Makam adalah 650 Hektar. Desa Balai Makam merupakan Desa tua yang ada di Kecamatan Bathin Solapan dan dimekarkan pada tahun 2013. Dari pemekaran ini terdapatlah tiga Desa, diantaranya Desa Simpang Padang, Desa Tambusai Batang Dui dan

Desa Pematang Obo. Suhu rata-rata di Desa ini adalah 40°C dengan kelembapan 30,00. Dengan status tingkat kebisingan “sedang” yang sumber kebisingannya berasal dari kendaraan yang melintas di jalur lintas menyebabkan aktifitas masyarakat menjadi terganggu. Desa Balai Makam mempunyai Visi dan Misi yaitu :

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Desa Balai Makam yang Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas dan Sejahtera”

MISI

1. Penempatan agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi
2. Meningkatkan profesionalisme Perangkat Desa sebagai pelayan masyarakat
3. Meningkatkan komunikasi dengan segenap komponen masyarakat
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dari seluruh kekuatan ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui sadar kebersihan, cepat tanggap untuk berobat dan peningkatan pendidikan dengan tuntas wajib belajar
6. Meningkatkan potensi pertanian sebagai sumber utama pendapatan masyarakat
7. Meningkatkan pembangunan guna percepatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan sarana dan prasarana umum

Wilayah Desa Balai Makam terdapat 4 Dusun, yaitu Dusun Balai Makam Lamo, Dusun Desa Maju, Dusun Ikri Bersatu dan Dusun Air Kulim. Dan terdapat 9 RW dan 45 RT di Desa ini. Layaknya Desa lain, Desa Balai Makam memiliki batas-batas wilayah, meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Kulim
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Simpang Padang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rohil (Rantau Kopar)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pematang Obo

B. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian jumlah total penduduk Desa Balai Makam pada tahun 2018 adalah 9.385 jiwa, dengan jumlah laki-laki 4.682 jiwa dan perempuan 4703 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga laki-laki 2015 KK dan perempuan 180 KK sehingga totalnya 2.195 KK. Dengan jumlah yang telah disebutkan, kepadatan penduduknya adalah 81,61 per KM.

C. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Keadaan sosial dan ekonomi penduduk Desa Balai Makam berikut ini akan dipaparkan mengenai mata pencaharian, tingkat pendidikan, sarana dan prasarana. Sebelum menjelasakannya, berikut adalah keadaan kesejahteraan keluarga di Desa Balai Makam :

Tabel IV.1 : Keadaan Kesejahteraan Keluarga Desa Balai Makam

No	Tahapan Kesejahteraan	Jumlah Keluarga
1	Keluarga Prasejahtera	-
2	Keluarga Sejahtera 1	560
3	Keluarga Sejahtera 2	159
4	Keluarga Sejahtera 3	971
5	Keluarga Sejahtera 3 Plus	510
Total Jumlah Kepala Keluarga		2200 keluarga

Sumber : Kantor Desa Balai Makam 2019

Dari tabel dapat dilihat bahwa di Desa Balai Makam terdapat lebih banyak keluarga yang berada di tahapan keluarga sejahtera 3 dengan jumlah 971 keluarga. Dan yang paling sedikit adalah tahapan keluarga sejahtera 2 dengan jumlah 159 keluarga. Yang berarti tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Balai Makam tidak begitu buruk.

a. Mata Pencaharian

Untuk mengetahui keadaan penduduk di Desa Balai Makam dapat dikelompokkan menurut mata pencaharian masyarakat yang dapat dipisahkan masing-masing jenisnya pada tabel berikut :

Tabel IV.2 : Keadaan Penduduk Desa Balai Makam Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	325	128
2	Buruh Tani	87	41
3	Pegawai Negeri Sipil	124	57
4	Peternak	35	22
5	Montir	22	-
6	Dokter Swasta	8	5
7	Bidan Swasta	-	12
8	Ahli Pengobatan Alternatif	3	-
9	TNI	5	-
10	POLRI	10	-
11	Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar	411	357
12	Dosen Swasta	5	2
13	Pembantu Rumah Tangga	-	15
14	Pedagang Keliling	93	81
15	Pengacara	1	2
16	Dukun Tradisional	-	1
17	Karyawan Perusahaan Swasta	556	15
18	Pensiunan	3	-
19	Pengrajin Industri Rumah Tangga Lainnya	20	15
Jumlah		2.463 orang	

Sumber : Kantor Desa Balai Makam 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian terbanyak adalah pengusaha kecil, menengah dan besar sedangkan mata pencaharian terbanyak yang kedua adalah karyawan perusahaan swasta. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk di Desa Balai Makam lebih memilih untuk membuka usaha sendiri.

b. Tingkat Pendidikan

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan dan melaksanakan pembangunan serta mengelola sumber daya alam yang tersedia

untuk dimanfaatkan diberbagai tamatan pendidikan. Gambaran pendidikan penduduk di Desa Balai Makam dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3 : Jumlah Tamatan Pendidikan Penduduk

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	Tamatan SD	558	561
2	Tamatan SMP	673	561
3	Tamatan SMA	881	829
4	Tamatan Diploma/S1/S2	315	369
5	Putus Sekolah SD/SMP/SMA	459	398
6	Jumlah	5.604 orang	

Sumber : Kantor Desa Balai Makam 2019

Dari tabel diatas tarik kesimpulan bahwa di Desa Balai Makam tamatan tingkat SMA adalah tamatan tingkat pendidikan yang paling banyak dengan jumlah 1.710 orang. Dan yang paling sedikit adalah tamatan Diploma/S1/S2 dengan jumlah 684 orang. Yang berarti dengan tingkat pendidikan seperti ini seharusnya penduduk sudah bisa mengelola sumber daya alam dengan baik.

c. Sarana dan prasarana

Setelah dipaparkan tentang tingkat pendidikan penduduk, tentu saja ada sarana dan prasarana berupa gedung sekolah yang sangat mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat. Dibawah ini adalah jenis sarana pendidikan di Desa Balai Makam, yaitu :

Tabel IV.4 : Jenis Sarana Pendidikan Desa Balai Makam

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	5
2	SD	3
3	SMP	1
4	SMA	2
Jumlah		11

Sumber : Kantor Desa Balai Makam 2019

Apabila dilihat dari data sarana pendidikan pada tabel diatas, maka sarana pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat sudah memadai, karena sarana pendidikan mulai dari TK sampai SMA sudah ada. Hanya saja sarana pendidikan seperti pasantren atau sekolah keagamaan yang belum dimiliki.

Agama atau aliran kepercayaan di Desa Balai Makam juga bermacam. Diantaranya masyarakat yang beragama Islam berjumlah 6.877 orang, yang beragama Kristen 1.440 orang, yang beragama Katolik 873 orang dan yang beragama Budha berjumlah 195 orang. Dari berbagai kepercayaan ini tentu saja harus memiliki sarana untuk beribadah dari masing-masing kepercayaan. Jenis sarana beribadah akan dituangkan pada tabel berikut :

Tabel IV.5 : Jenis Sarana Tempat Ibadah di Desa Balai Makam

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Mesjid	11
2	Surau/Musholla	11
3	Gereja Kristen Protestan	3
4	Gereja Kristen Katolik	1
Jumlah		26

Sumber : Kantor Desa Balai Makam 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah mesjid dan musholla adalah jumlah tempat ibadah yang paling banyak sesuai dengan jumlah masyarakat di Desa Balai Makam yang mayoritas beragama Islam. Dan jumlah tempat ibadah yang paling sedikit adalah gereja Kristen Katolik.

D. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Balai Makam

Unsur pemerintahan di Desa Balai Makam dijalankan sesuai dengan peraturan yang mengatur dan berlaku. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa dipilih oleh masyarakat Desa Balai Makam melalui pemilihan langsung.

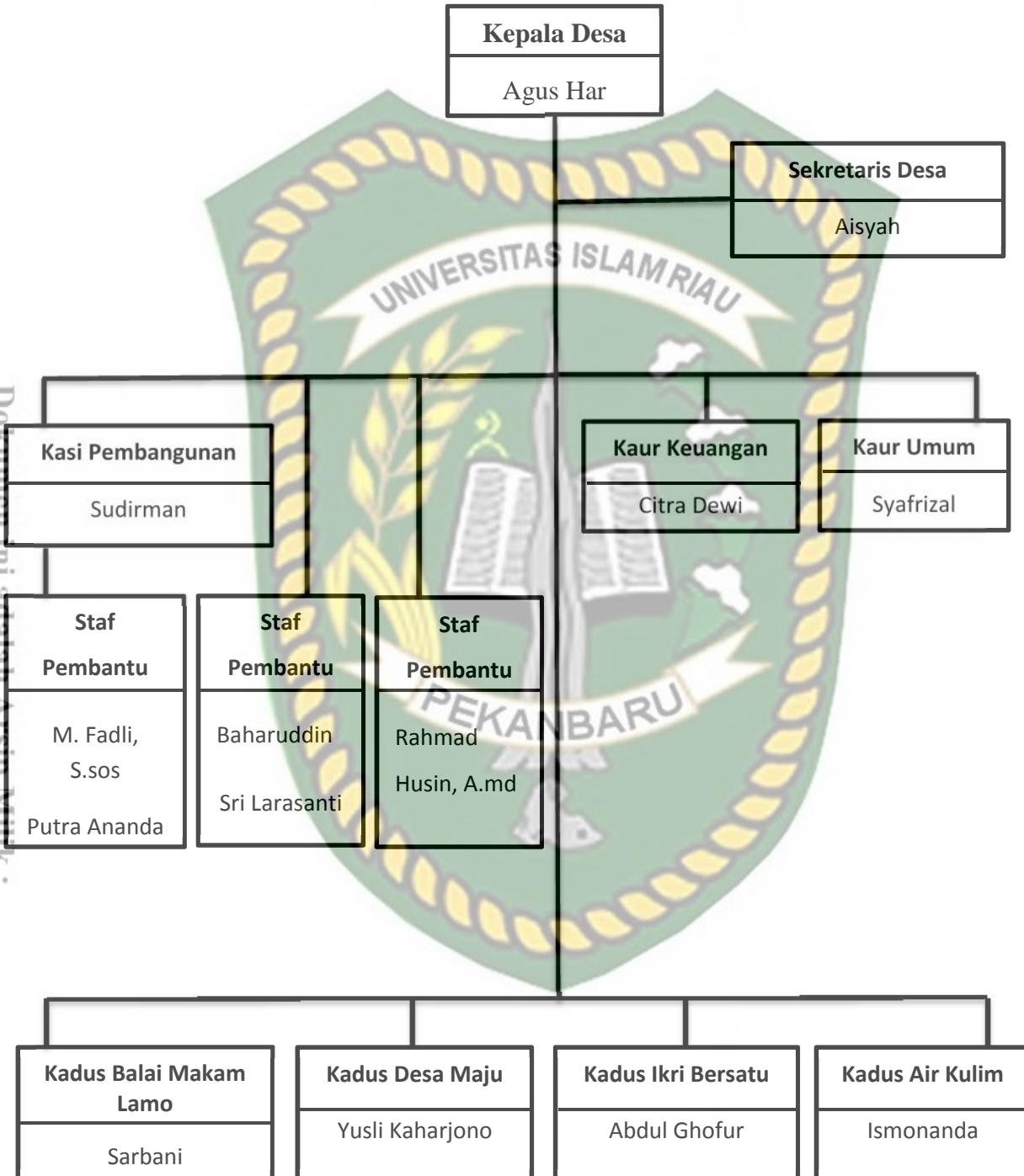
Kepala Desa tentu saja tidak bekerja sendiri, ia dibantu dibantu oleh aparat Desa yang bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.6 : Aparat Pemerintah Desa Balai Makam

No	Nama	Jabatan
1	Agus Har	Kepala Desa
2	Aisyah	Sekretaris Desa
3	Citra Dewi	Kepala Urusan Keuangan
4	Syafrizal	Kepala Urusan Umum
5	Sudirman	Kepala Seksi Pembangunan
6	H. Bona Faisal	Ketua BPD
7	Sarbaini	Kepala Dusun Balai Makam Lamo
8	Yusli Kaharjono	Kepala Dusun Desa Maju
9	Abd. Ghofur	Kepala Dusun Ikri Bersatu
10	Ismonandar	Kepala Dusun Air Kulim

Sumber : Kantor Desa Balai Makam 2019

Gambar IV.1 : Struktur Pemerintahan Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis



Sumber : Modifikasi Penelitian 2019

E. Gambaran Singkat Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu

BUMDes dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan hasil dari musyawarah Desa Balai Makam yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2017 bertempat di Desa Balai Makam, disepakati untuk membentuk BUMDes. Dalam Peraturan Desa Balai Makam Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa disebutkan BUMDes yang didirikan ditetapkan dengan nama BUMDes Balai Makam Berstau. Potensi ekonomi perdesaan yang dimiliki adalah home industri, pertanian dan perkebunan, simpan pinjam, perdagangan dan lain-lain. Kegiatan usaha yang sedang berjalan adalah Unit Usaha Simpan Pinjam Balai Makam Bersatu. Berikut adalah tabel kegiatan usaha yang direncanakan akan dikembangkan :

Tabel IV.7 : Kegiatan Usaha yang Direncanakan akan Dikembangkan

No	Nama Unit Usaha	Produk/Kegiatan yang dilaksanakan atau dihasilkan
1	Pandai Beli	Beli harga kontan bayar cicilan
2	Usaha Distributor Bahan Pangan	Beras, minyak, gula, dll
3	Jasa Pembuatan Sumur Bor	Pembuatan sumur bor
4	Jasa Service AC	Service AC

Sumber : Kantor Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu 2019

Jenis usaha BUM Desa Balai Makam Bersatu berupa :

- a) Bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum pada masyarakat.
- b) Bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat.
- c) Usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan pada warga.

- d) Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- e) Bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- f) Usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan penelitian terhadap seluruh responden yang digunakan sebagai sampel, maka bab ini akan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner. Dimana dalam penelitian ini menggunakan sampel yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 1 orang Direktur BUM Desa, 1 orang Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam, 1 orang Tata Usaha, 1 Orang Kasir, 1 Orang Staff Analisis Kredit, 25 Orang masyarakat pemanfaat unit usaha simpan pinjam dan semua sampel berjumlah 31 orang.

a. Jenis Kelamin Responden

Identitas responden ini akan memuat jenis kelamin dari responden. Hal ini sesungguhnya tidak akan berpengaruh besar terhadap analisa data, namun perlu dinilai untuk kelengkapan data responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu :

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	22
2	Perempuan	9
Jumlah		31

Sumber : Olahan Data Penelitian 2019

Dari tabel dapat dilihat bahwa mayoritas responden adalah laki-laki dengan jumlah 22 orang dengan minoritas perempuan yang berjumlah 9 orang.

b. Usia Responden

Dalam penelitian ini terdapat keberagaman usia responden, dimana usia ini memengaruhi kemampuan responden dalam memberikan penilaian terhadap dampak unit usaha simpan pinjam. Adapun tabel berikut akan memaparkan identitas responden berdasarkan usia :

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Rentang Usia	Jumlah
1	26 – 30	8
2	31 – 35	8
3	36 – 40	6
4	41 – 45	2
5	46 – 50	4
6	51 – 55	1
7	56 – 60	2
Jumlah		31

Sumber : Data Olahan Peneliti 2019

Pada tabel dapat dilihat secara keseluruhan bahwa responden yang paling banyak adalah berusia sekitar 26-30 tahun dengan jumlah 8 orang dan usia 31-35 tahun juga berjumlah 8 orang. Dan rentang usia yang sedikit atau hanya satu orang adalah responden yang berusia 52 tahun atau berada pada rentang 51-55 tahun.

c. Pendidikan Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran kuisisioner, jawaban yang diberikan oleh responden tentu saja berbeda-beda. Selain karena perbedaan sifat manusia, juga dapat dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah. Dan yang menjadi responden dalam penelitian ini tentu saja tingkat pendidikannya berbeda-beda. Berikut tabel tingkat pendidikan responden :

Tabel V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	2
2	SMP	5
3	SMA	20
4	DIII	3
5	S1	1
Jumlah		31

Sumber : Data Olahan Penelitian 2019

Dari tabel dapat dilihat bahwa responden yang berpendidikan SMA adalah paling banyak dengan jumlah 20 orang, dan responden yang berpendidikan S1 paling sedikit dengan jumlah 1 orang.

B. Hasil Penelitian Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan analisis jawaban-jawaban responden yang berasal dari Kepala Desa, Direktur BUM Desa, Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam, Tata Usaha, Kasir dan Staff Analisis Kredit. Dimana indikator-indikator tersebut adalah :

1. *Input* (masukan)
2. *Proses* (proses)
3. *Output* (keluaran)
4. *Outcomes* (dampak)

Berikut ini akan dijelaskan hasil tanggapan responden-responden tersebut terhadap indikator-indikator penilaian :

1. *Input* (masukan)

Input (masukan) adalah masukan yang digunakan agar sistem berfungsi. Evaluasi pada tahap awal program ini untuk memastikan bahwa rencana yang akan dilaksanakan sesuai dengan masalah yang ditemukan, yang meliputi sumber daya, dana, tenaga, sarana dan prasarana yang ada. Untuk indikator *input* (masukan) diajukan tiga item penilaian yaitu kualitas pengelola, modal pinjaman serta kondisi sarana dan prasarana. Dimana jawabannya bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.4 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator *Input* (masukan)

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator						Jumlah	
		Baik		Kurang Baik		Tidak Baik			
1	Kualitas Pengelola	21	68%	7	22%	3	10%	31	100%
2	Modal pinjaman	27	87%	-	-	4	13%	31	100%
3	Kondisi sarana dan prasarana	8	26%	23	74%	-	-	31	100%
Jumlah		56	181%	30	96%	7	23%	93	300%
Rata-rata		19	60%	10	32%	2	8%	31	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2019

Dapat dilihat bahwa kualitas pengelola baik. Dimana masyarakat pengelola bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang menilai bahwa pengelola memberikan pelayanan dengan baik dan ramah kepada masyarakat yang meminjam. Lalu dari proses pemilihannya, pengelola memiliki syarat minimal tamatan pendidikan tingkat SMA. Dan pengelola pun sudah pernah diberikan pelatihan yang diadakan di Bengkalis.

Modal pinjaman pun sudah dinilai baik. Dilihat dari penilaian responden, modal pinjaman sudah memenuhi pinjaman mereka karena masyarakat merasa

pinjaman mereka terpenuhi. Pengelola pun menilai mereka telah bisa memenuhi pinjaman untuk masyarakat karena dana yang masih terus bisa digulirkan. Dimana jumlah pinjaman maksimal sebesar Rp. 30.000.000 per KK. Modal pada tahun 2012 sebanyak Rp. 1.000.000.000 hingga 5 tahun dan sekarang jumlah seluruh modal ± Rp. 11.000.000.000,-

Kondisi sarana dan prasarana yang juga sudah dinilai baik oleh responden dan pengelola. Pengelola merasa sarana dan prasarana sudah baik karena mereka memiliki alat seperti komputer, sofa dan kantor pelayanan. Hanya saja pengelola merasa kurang dari segi transportasi untuk dilapangan yang kurang menunjang.

2. Proses (proses)

Proses (proses) adalah bagaimana kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Yang berarti bagaimana bentuk proses yang harus dilalui oleh masyarakat. Bentuk tanggapan responden pada tabel dibawah :

Tabel V.5 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator *Proses* (proses)

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator						Jumlah	
		Baik		Kurang Baik		Tidak Baik			
1	Verifikasi calon pemanfaat	25	81%	5	16%	1	3%	31	100%
2	Membuat pelatihan berwirausaha	-	-	-	-	31	100%	31	100%
3	Penentuan agunan	26	84%	2	6%	3	10%	31	100%
Jumlah		51	165%	7	22%	35	113%	93	300%
Rata-rata		17	55%	2	7%	12	38%	31	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2019

Verifikasi calon pemanfaat sudah dilakukan dengan baik karena mereka melakukan survey terlebih dahulu ketempat masyarakat calon pemanfaat. Tetapi

verifikasi calon pemanfaat hanya dilakukan dengan menggunakan survey yang juga masih menyebabkan masyarakat kurang beruntung yang seharusnya berhak mendapatkan pinjaman tetapi tidak mendapatkannya.

Pada poin membuat pelatihan berwirausaha ini, unit usaha simpan pinjam belum memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat. Tentu saja hal ini sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena berkaitan dengan usaha mereka. Karena belum dilakukannya pelatihan berwirausaha sehingga tidak sedikit masyarakat yang usaha mereka tidak berkembang dengan baik. Dalam berwirausaha tentu harus diketahui bagaimana strateginya, misal seperti menentukan tempat berwirausaha, jenis usaha yang akan dilakukan, cara mengelola keuangan dan sebagainya.

Dari hasil angket yang ditanyakan kepada masyarakat mereka merasa sanggup dan tidak merasa keberatan atas agunan yang telah ditetapkan kepada mereka. Agunan tersebut tidak memberatkan sebagian besar mereka, tetapi masih ada masyarakat yang merasa sedikit memberatkan. Tentu saja mereka tidak merasa keberatan atas agunan yang diberikan, karena pemanfaat adalah masyarakat yang mempunyai perekonomian menengah keatas, jika masyarakat yang kurang mampu tentu saja mereka merasa berat atas agunan yang diberikan.

3. Output (keluaran)

Output (keluaran) adalah hasil dari pelaksanaan kebijakan. Yaitu apakah kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak. Penilaian tersebut dapat dilihat dari tanggapan responden yang akan diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel V.6 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator *Output* (keluaran)

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator						Jumlah	
		Baik		Kurang Baik		Tidak baik			
1	Meningkatkan Kreativitas Berusaha	10	32%	11	36%	10	32%	31	100%
2	Menghindarkan masyarakat dari pinjaman dengan bunga tinggi	26	84%	5	16%	-	-	31	100%
Jumlah		36	116%	16	52%	10	32%	62	200%
Rata-rata		18	58%	8	26%	5	16%	31	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2019

Dalam meningkatkan kreativitas berusaha, unit usaha simpan pinjam masih kurang baik dalam hal ini. Karena banyaknya masyarakat yang membuka usaha dengan jenis yang itu-itu saja. Salah satu hal yang membuat masyarakat tidak bervariasi mungkin salah satunya adalah karena mereka yang menentukan usaha yang apa yang harus dibuka. Tentu saja bagi masyarakat yang kurang paham untuk berwirausaha menjadi bingung. Memang masih ada masyarakat yang bisa mengelola usahanya sehingga usahanya masih tetap bertahan, tetapi tidak semua masyarakat bisa melakukan ini. Untuk mengembangkan usaha tentu saja membutuhkan pengetahuan yang belum diketahui oleh masyarakat. Sehingga masih banyak usaha yang tidak berkembang dengan baik.

Selanjutnya menghindarkan masyarakat dari pinjaman dengan bunga tinggi. Dari angket yang sudah diberikan lalu dijawab oleh responden, banyak masyarakat yang menjawab poin ini sudah baik. Dimana sekarang sudah banyak masyarakat yang lebih memilih meminjam kepada unit usaha simpan pinjam,

karena menurut mereka bunganya jauh lebih ringan dan membuat mereka yang membayar merasa lebih ringan.

4. *Outcomes* (dampak)

Outcomes (dampak) adalah penilaian apakah suatu pelaksanaan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan? Yang penilaiannya dapat dilihat dari tanggapan responden pada tabel dibawah ini:

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator *Outcomes* (dampak)

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator						Jumlah	
		Baik		Kurang Baik		Tidak Baik			
1	Meningkatkan pendapatan masyarakat	13	42%	12	39%	6	19%	31	100%
2	Masyarakat tidak bergantung kepada rentenir	18	59%	2	6%	11	36%	31	100%
Jumlah		31	101%	14	45%	17	55%	62	200%
Rata-rata		15	50%	7	22%	9	28%	31	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2019

Dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat, rata-rata masyarakat masih memiliki pendapatan yang biasa saja atau tidak jauh berbeda dari pendapatan mereka sebelumnya. Dilihat dari usaha yang mereka miliki belum bisa berkembang dengan baik, sehingga belum terlalu membantu untuk menambah pendapatan. Memang masih ada masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya pinjaman ini, tetapi tidak semua masyarakat yang merasakan hal ini. Hanya sebagian kecil masyarakat yang merasakan peningkatan pendapatannya karena mereka berhasil mengembangkan usahanya.

Masyarakat yang bergantung kepada rentenir bisa diatasi oleh unit usaha simpan pinjam. Karena kecilnya suku bunga dan agunan dari unit usaha simpan pinjam yang membuat masyarakat merasa tidak keberatan dan lebih memilih untuk meminjam kepada unit usaha simpan pinjam. Masyarakat yang dahulu meminjam kepada rentenir sekarang beralih dan lebih memilih untuk meminjam kepada unit usaha simpan pinjam. Walaupun masih ada masyarakat yang memilih meminjam kepada rentenir, tetapi bukan dengan jumlah yang banyak.

Untuk menilai hasil dari penelitian ini, penulis akan menguraikannya dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut :

Tabel V.8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator						Jumlah	
		Baik		Kurang Baik		Tidak Baik			
1	<i>Input</i> (masukan)	19	60%	10	32%	2	8%	31	100%
2	<i>Proses</i> (proses)	17	55%	2	7%	12	38%	31	100%
3	<i>Output</i> (keluaran)	18	58%	8	26%	5	16%	31	100%
4	<i>Outcomes</i> (dampak)	15	50%	7	22%	9	28%	31	100%
Jumlah		69	223%	27	87%	28	90%	124	400%
Rata-rata		17	56%	7	22%	7	22%	31	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2019

Dari rekapitulasi indikator *input* (masukan) dinilai sudah lumayan baik, dengan hasil rata-rata 60%. Dari indikator *input* (masukan) yang dinilai adalah

kualitas pengelola, modal pinjaman dan kondisi sarana dan prasarana unit usaha simpan pinjam. Yang pertama dari kualitas pengelola, walaupun banyak masyarakat yang merasa pelayanan yang diberikan oleh pengelola sudah baik, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang merasa belum diberikan pelayanan yang kurang baik oleh pengelola. Dimana sebagian kecil masyarakat ini merasa pengelola hanya melayani dengan baik saat meminjam, tetapi saat menagih pinjaman mereka tidak dengan ramah. Yang kedua dari modal pinjaman, banyak masyarakat yang merasa jumlah pinjamannya telah terpenuhi oleh unit usaha simpan pinjam, berarti modal sudah mencukupi. Tetapi masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau tau akan hal ini. Tetapi memang pada dasarnya modal ini sudah mencukupi, tetapi tidak semua pinjaman masyarakat terpenuhi karena masih adanya masyarakat yang meminjam tetapi jumlah pinjaman yang didapat tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan. Selanjutnya adalah kondisi sarana dan prasarana. Dimana masyarakat masih masih banyak yang menilai biasa saja. Tetapi jika dilihat sekilas saja, sudah bisa dilihat mungkin prasarana yang dimiliki sudah melengkapi tetapi tidak dengan dengan sarana kantor pelayanan yang masih kurang memungkinkan untuk dikatakan sebagai sebuah kantor.

Dari hasil rekapitulasi dapat dikatakan indikator *proses* (proses) kurang baik dengan rata-rata persentase 55%. Berdasarkan hasil pertanyaan dari angket yang diisi oleh masyarakat, penilaian pertama tentang verifikasi calon pemanfaat sudah dilakukan dengan baik karena survey yang dilakukan oleh tim pengelola. Tetapi masih ada sebagian masyarakat yang merasa proses verifikasi belum berjalan dengan begitu baik karena masih ada masyarakat yang menggunakan

dana pinjaman ini untuk berwirausaha. Yang kedua membuat pelatihan berwirausaha. Berkembang atau tidaknya sebuah usaha tentu saja tergantung bagaimana masyarakat tersebut mengelola dan mengembangkan usahanya. Masih banyak masyarakat yang belum bisa mengembangkan usaha mereka dengan baik, salah satu faktornya adalah tidak adanya pelatihan kewirausahaan yang dilakukan. Pelatihan kewirausahaan dilakukan tentu saja untuk membantu masyarakat dalam memilih jenis usaha yang dibuka, bagaimana memilih tempat berjualan yang strategis dan sebagainya. Masyarakat yang meminjam pada unit usaha simpan pinjam menentukan sendiri usaha yang akan mereka buka. Sehingga masyarakat yang tidak begitu paham akan membuka usaha yang biasa saja dan itu-itu saja tanpa berkreasi, disinilah guna pelatihan kewirausahaan dilakukan. Dan tentang penentuan agunan, banyak masyarakat yang merasa tidak keberatan dan sanggup atas agunan yang ditetapkan oleh unit usaha simpan pinjam. Tetapi tentu saja tidak semua kalangan masyarakat, masih ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan atas agunan yang ditetapkan. Masyarakat yang merasa keberatan atas agunan yang diberikan karena usaha mereka yang tidak berkembang dengan baik sehingga mereka merasa berat untuk membayar hutang kepada unit usaha simpan pinjam. Tetapi pada unit usaha simpan pinjam sebagian besar masyarakat tentu saja tidak merasa keberatan atas agunan karena mereka adalah masyarakat yang memiliki perekonomian menengah keatas dan tidak ada diantara mereka masyarakat yang kurang mampu.

Penilaian dari indikator *output* (keluaran) adalah kurang baik dengan rata-rata jumlah persentase adalah 58%. Dilihat dalam meningkatkan kreativitas

berusaha, unit usaha simpan pinjam sepertinya belum berhasil melakukan ini. Dilihat dari banyak usaha masyarakat yang belum berkembang baik, banyaknya masyarakat yang membuka usaha biasa-biasa saja tanpa berkreaitivitas. Sehingga usaha belum bisa beradu dengan usaha-usaha kreatif lainnya. Dari banyaknya usaha yang tidak berkembang dengan sudah bisa dilihat bahwa kreativitas berusaha ini belum dimiliki oleh masyarakat. Dan dalam menghindari masyarakat dari pinjaman dengan bunga tinggi sudah berhasil diatasi oleh unit usaha simpan pinjam. Banyak masyarakat yang menanggapi baik tentang bunga pinjaman unit usaha simpan pinjam ini. Masyarakat merasa lebih meringankan mereka dalam melakukan pembayaran karena bunga yang kecil. Dan masyarakat lebih banyak memilih meminjam kepada unit usaha simpan pinjam.

Tanggapan responden mengenai indikator *outcomes* (dampak) memperoleh jumlah rata-rata 50% yang berada pada kategori kurang baik. Dilihat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, kegiatan unit usaha simpan pinjam ini belum berhasil membantu masyarakat karena tidak semua masyarakat bisa mengembangkan dan mengelola usahanya dengan baik. Tata cara mengelola dan mengembangkan usaha yang belum dipahami oleh masyarakat sehingga tidak membuat masyarakat yang membuka usaha tidak bisa mengembangkan usaha mereka. Berkembang atau tidaknya usaha yang dimiliki oleh masyarakat tentu saja mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat dan kelanjutan untuk melunasi pinjaman. Dan yang terakhir adalah masyarakat tidak bergantung kepada rentenir. Unit usaha simpan pinjam banyak membantu masyarakat, tidak hanya dari segi meminjamkan dana tetapi dengan memberikan pinjaman dengan bunga yang

rendah sehingga unit usaha simpan pinjam berhasil membuat masyarakat beralih dan tidak meminjam lagi kepada rentenir. Banyak masyarakat dahulu meminjam kepada rentenir tetapi setelah adanya unit usaha simpan pinjam masyarakat memilih beralih karena tidak lagi meminjam lalu membayar dengan bunga yang tinggi.

Hasil rekapitulasi tanggapan responden dari semua indikator penilaian dapat dikatakan kurang baik dengan jumlah rata-rata persentase 56% yang berdasarkan hasil pengukuran indikator yaitu apabila hasil tanggapan responden berada pada kategori kurang baik maka rentang persentase 34%-66%. Dari seluruh indikator penilaian dapat disimpulkan bahwa unit usaha simpan pinjam yang lumayan baik dimana pengelola sudah melayani masyarakat dengan baik yang sudah dengan dibekali dengan pelatihan dan dengan ketentuan pendidikan terakhir minimal SMA. Dengan modal pinjaman yang bisa dikatakan mempunyai jumlah yang banyak, tetapi unit usaha simpan pinjam belum bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Karena modal yang seharusnya diberikan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu tetapi pada kenyataan dilapangan dari seluruh masyarakat pemanfaat unit usaha simpan pinjam belum ada yang memanfaatkannya adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Salah satu penyebab hal ini karena agunan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan, tetapi masyarakat yang kurang mampu tidak bisa memenuhi agunan tersebut. Lalu bagi masyarakat pemanfaat, pada saat melakukan pinjaman awal belum bisa mendapatkan modal pinjaman sesuai yang mereka ajukan. Dimana pinjaman ini baru bisa diberikan sesuai dengan jumlah yang diajukan jika sudah dilakukan

penilaian dari pengembalian pinjaman awal, apakah pemanfaat bisa mengembalikan uang pinjaman dengan tepat waktu dan dinilai dari 6 bulan pertama pembayaran. Jika saat pinjaman pertama melakukan pembayaran dengan tepat waktu, maka masyarakat baru bisa diberikan pinjaman sesuai dengan jumlah yang diajukan. Berarti jika masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan pinjaman, maka unit usaha simpan pinjam belum melakukan proses verifikasi calon pemanfaat dengan tepat karena yang mendapatkan pinjaman adalah masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah keatas. Dan masyarakat masih bergantung kepada unit usaha simpan pinjam karena jumlah pinjaman yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan, sehingga selanjutnya masyarakat harus kembali meminjam. Dan hal ini juga bersangkutan dengan agunan, berarti agunan yang diberikan belum berpihak kepada masyarakat miskin. Mengapa masyarakat pemanfaat tidak keberatan dengan agunan yang ditetapkan? Karena mereka mampu dan mereka bukanlah target dari tujuan unit usaha simpan pinjam. Masyarakat yang sudah meminjam juga belum bisa mengembangkan usahanya dengan baik, yang salah satu penyebabnya adalah belum adanya dilakukan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara mengembangkan sebuah usaha dan strategi berwirausaha yang baik. Pada umumnya masyarakat hanya membuka usaha yang telah banyak ditengah-tengah masyarakat seperti kedai harian, sehingga belum ada ekspresi hasil karya masyarakat. Belum dilakukannya pelatihan kewirausahaan ini dikatakan oleh pengelola adalah karena belum adanya kejelasan serta keputusan yang tetap dari

Kabupaten. Semua hal ini tentu saja hal-hal yang membuat masyarakat belum bisa meningkatkan pendapatan mereka. Bagaimana pendapatan masyarakat akan meningkat jika usaha yang diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan tidak berkembang dan berjalan dengan baik. Dan dari hasil berwirausaha mereka harus membayar kewajiban membayar hutang kepada unit usaha simpan pinjam. Tetapi dari hal lain unit usaha simpan pinjam berhasil membantu masyarakat keluar dari jeratan pinjaman kepada rentenir. Masyarakat banyak beralih dan memilih meminjam kepada unit usaha simpan pinjam karena tidak perlu melakukan pengembalian dengan bunga yang tinggi.

C. Hambatan Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu Terhadap Pendapatan Masyarakat Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Adapun hambatannya unit usaha simpan pinjam adalah :

1. Memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan cara dan proses yang sesuai dengan peraturan, yaitu dengan meminta agunan kepada masyarakat pemanfaat yang membuat hal ini tidak disanggupi oleh masyarakat miskin dan bahkan di Desa Balai Makam ini pun belum pernah memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin yang berarti banyaknya masyarakat yang kurang berhak yang mendapatkan pinjaman.
2. Kemudian BUM Desa belum memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat yang membuat masyarakat tidak bisa dengan

begitu baik mengembangkan usahanya bahkan bangkrut, sehingga belum membantu pendapatan masyarakat.

3. Masyarakat membuka usaha dengan modal yang dimiliki, tetapi mereka tidak mendapatkan pinjaman sesuai yang mereka butuhkan yang membuat masyarakat harus meminjam lagi untuk yang kedua kalinya atau lebih yang membuat masyarakat masih tetap bergantung kepada unit usaha simpan pinjam.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis diatas, penulis mengemukakan kesimpulan dari penelitian bahwa Evaluasi Unit Usaha Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa Balai Makam Bersatu terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis berada dalam kategori kurang baik dalam pemberdayaan masyarakat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa unit usaha simpan pinjam belum membantu terhadap pendapatan masyarakat, karena masyarakat tidak memiliki kreativitas untuk mengembangkan usaha dan masih bergantungnya msyarakat kepada unit usaha simpan pinjam yang membuat tidak membantu pendapatan masyarakat. Hasil berwirausaha yang seharusnya bisa dijadikan sebagai pendapatan tetapi harus disisihkan untuk membayar pinjaman karena masih tbergantung kepada unit usaha simpan pinjam.

Faktor penghambat dari unit usaha simpan pinjam adalah agunan yang belum bisa membantu masyarakat miskin sehingga tidak adanya masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang meminjam di unit usaha simpan pinjam. Kemudian BUM Desa belum memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat yang meminjam kepada unit usaha simpan yang membuat banyak masyarakat belum bisa mengembangkan usahanya dengan baik karena mereka tidak tau bagaimana cara mengelola usaha dengan tepat.

B. Saran

1. Kepada pengelola unit usaha simpan pinjam diharapkan agar melakukan proses verifikasi dengan lebih baik dan benar-benar memilih masyarakat yang mendapatkan pinjaman. Karena tujuan dari kegiatan ini untuk membantu masyarakat yang tingkat ekonominya rendah, tetapi hal yang terjadi adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan pinjaman.
2. Perlunya dilakukan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat pemanfaat agar mereka tahu bagaimana mengelola usaha yang baik dan benar, sehingga hasil usaha bukan hanya sekedar untuk membayar hutang kepada unit usaha simpan pinjam tetapi benar-benar membantu pendapatan masyarakat. Dan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan agar memberikan kepastian yang tegas serta memberikan dana agar pengelola bisa melakukan pelatihan berwirausaha.
3. Dan saran yang terakhir adalah diharapkan kepada pengelola agar memberikan jumlah pinjaman kepada masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan, dengan harapan jika jumlah yang diberikan sudah sesuai dan usaha masyarakat maju sehingga masyarakat tidak bergantung lagi kepada unit usaha simpan pinjam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amirin. 2001. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Joesyana, Kiki. 2016. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Pekanbaru: Fisipol UIR
- Kansil, C.S.T. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Koswara, Deni. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Grasindo
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moekijat. 1995. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju
- Ndraha, Taliziduhu. 1999. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2005. *Kybernologi, Sebuah Konstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama

Sutopo dan Sugiyanto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Politik*. Jakarta: PT Rineka Cipta

_____. 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama

_____. 2015. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Wahab, Solichin Abdul. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangusong. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung: IPDN Press

Zulkifli, dkk. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru: Fisipol UIR

Jurnal

Kirowati, Dewi dan Lutfiyah Dwi S. 2018. “Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Tembora Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)”. *Jurnal AKSI (Akutansi dan Sistem Informasi)* Vol. 1 Edisi 1 Mei 2018 p-ISSN : 2528-6145 dan e-ISSN: 258-3198

Ngutra, Thersia. 2017. “Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin di Kota Makassar”. Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar

Rosni. 2017. “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara”. *Jurnal Geografi* Vol. 9 No. 1, 2017 e-ISSN: 2549-7057 dan p-ISSN: 2085-8167

Tama, Dantika Ovi Era dan Yanuardi. 2013. “Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul”. Tesis Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Kekhususan Pembangunan Sosial Fisipol UI

Skripsi

Herdandi. 2016. "Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Madrasah Diniyah Di Kota Cilegon". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Radi Deprianto. 2017. "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam pemberdayaan Masyarakat Di Desa Muara Mahat Baru Kec. Tapung Kab. Kampar". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

Zirvia, Indah. 2015. "Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2015". Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

Dokumentasi

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa ke Badan Usaha Milik Desa yang Berasal dari Dana Usaha Ekonomi Desa

Peraturan Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa